

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi, dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Di dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, seperti Pengawasan Pendahuluan (*preliminary control*), Pengawasan Pada Saat Kerja Berlangsung (*cocurrent control*), dan Pengawasan Feed Back (*feed back control*). Di dalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu Tahap Penetapan Standar, Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan, dan Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi.

Suatu organisasi juga memiliki perancangan proses pengawasan, yang berguna untuk merencanakan secara sistematis dan terstruktur agar proses pengawasan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk menjalankan proses pengawasan tersebut dibutuhkan alat bantu manajerial dikarenakan jika terjadi kesalahan dalam suatu proses dapat langsung diperbaiki. Selain itu, pada alat-alat bantu pengawasan ini dapat menunjang terwujudnya proses pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan juga meliputi bidang-bidang pengawasan yang menunjang keberhasilan dari suatu tujuan organisasi. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau

penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi pelaksanaan kebijakan pimpinan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab kepala pemerintahan. Terselenggaranya pemerintahan yang baik memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan sah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, dan bertanggungjawab.

Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawas atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur (Mardi, 2009). Tujuan utama dari pengawasan Inspektorat ini adalah untuk membantu pihak yang diawasi dalam menunaikan tugasnya secara baik guna meningkatkan kinerja. Agar pengawasan dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukannya peran lembaga - lembaga teknis dan fungsional yang berkaitan dengan tugas pengawasan.

Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu instansi yang ada di pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/kota, berdasarkan asas desentralisasi,

dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengembangkan suatu strategi yang dikemas dalam Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah). Program Desa mandiri Anggur Merah diluncurkan Gubernur NTT Frans Lebu Raya pada HUT NTT ke 53 tanggal 20 Desember 2010. Dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri “Anggur Merah” disebutkan bahwa pemerintah Provinsi mengalokasikan *frash money* sebesar 250 juta yang bersumber dari APBD untuk setiap Desa dan setiap Desanya didampingi oleh satu orang pendamping. Melalui Program Anggur Merah yang rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data Jumlah Desa Penerima Dana Hibah Anggur Merah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2011 - 2016

NO	TAHUN	JUMLAH DESA	BESARNYA DANA
1	2011	287	Rp. 71.750.000.000
2	2012	298	Rp. 74.500.000.000
3	2013	306	Rp. 76.500.000.000
4	2014	589	Rp. 147.250.000.000
5	2015	589	Rp.147.250.000.000
6	2016	589	Rp.147.250.000000

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT

Tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa dari 3268 jumlah Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah sebanyak 2658 Desa yang mendapatkan dana hibah dari program ini dan besarnya dana yang dialokasikan sebanyak Rp.664.500.000.000. Pada tahun 2017 direncanakan akan dilaksanakan di 589 Desa/Kelurahan. Mengingat sangat besarnya dana yang diluncurkan langsung kepada kelompok masyarakat Desa/Kelurahan, maka perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Inspektorat untuk mengawasi semua kegiatan pembangunan

Desa/Kelurahan Mandiri melalui program Anggur Merah, agar dana yang diluncurkan ini dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok masyarakat dalam membangun Desa. Diupayakan kemandirian masyarakat dalam membangun Desa dapat diimplementasikan, program pembangunan Desa mandiri anggaran teraktualisasi, kemandirian dalam perencanaan, pelaksanaan dan kontrol dari masyarakat merupakan hal yang diharapkan seiring dengan kemajuan dan pencapaian keberdayaan aparat dan masyarakat Desa.

Kabupaten Flores Timur terdiri dari 250 Desa yang terbagi dalam 19 kecamatan dan sudah sebanyak 145 Desa yang mendapatkan dana dari program ini. Berikut merupakan rincian jumlah Desa penerima dana hibah Anggur Merah Kabupaten Flores Timur sejak tahun 2011 hingga tahun 2016.

Tabel 1.2

Data Jumlah Desa Penerima Dana Hibah Anggur Merah
Kabupaten Flores Timur
Tahun 2011 – 2016

NO	TAHUN	JUMLAH DESA	BESARNYA DANA
1	2011	19	Rp. 4.750.000.000
2	2012	19	Rp. 4.750.000.000
3	2013	19	Rp. 4.750.000.000
4	2014	44	Rp. 11.000.000.000
5	2015	19	Rp.4.750.000.000
6	2016	25	Rp.6.250.000.000

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTT

Adapun bentuk usaha yang dijalankan oleh kelompok masyarakat Desa/Kelurahan di Kabupaten Flores Timur adalah berupa usaha ternak babi, ternak kambing, ternak ayam, usaha batu merah, dan usaha sayur-sayuran. Mengingat bentuk usaha yang dijalankan bersama oleh kelompok masyarakat Desa/Kelurahan terancam macet, maka semua usaha yang dijalankan akan diberhentikan dan beralih ke koperasi simpan pinjam. Pihak Inspektorat kurang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Anggur Merah dan tidak adanya tindak lanjut yang

tegas yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat pengelola dana Program Anggur Merah sehingga masyarakat tidak serius dalam menjalankan usaha dan mengakibatkan usaha yang dijalankannya terancam macet.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan pengawasan terhadap Program Pembangunan Desa Mandiri Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) yang berjudul **“Dampak Pengawasan Inspektorat Terhadap Pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah di Kabupaten Flores Timur”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pelaksanaan Program Anggur Merah di Kabupaten Flores Timur?
2. Apa dampak dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap pelaksanaan Program Anggur Merah di Kabupaten Flores Timur?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pelaksanaan program Anggur Merah di Kabupaten Flores Timur
- b. Untuk mengetahui dampak dari pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat terhadap program Anggur Merah di Kabupaten Flores Timur.

2. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi kelompok masyarakat yang mendapatkan dana dari Program Anggur Merah, agar dapat mengelola dana sesuai dengan bentuk usaha yang sudah dibangun bersama.
- b. Untuk pemerintah daerah, dalam hal ini Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengawasan terhadap Program Anggur Merah.

